

**CATATAN RAPAT
KOMISI I DPR RI**

(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun Sidang	: 2011-2012
Masa Persidangan	: III
Jenis Rapat	: RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Rabu, 19 Januari 2011
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat	: H. Hayono Isman, S.IP
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: Audiensi untuk menyampaikan hasil monitoring terhadap regulator terhadap regulator media dan komunikasi
Hadir	: 26 orang dari 49 orang Anggota Komisi I DPR RI
Hadir	: Ketua Pr2Media : Amir Effendi Siregar, MA dan para peneliti Pr2Media

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi I DPR RI pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2011 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman, S.IP., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. PENJELASAN PR2MEDIA :

Penelitian Pr2media mengenai eksistensi lembaga regulator media pada era reformasi dilatarbelakangi dari Perubahan struktur politik dari negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter menjadi negara demokrasi menyebabkan kehidupan media massa mengalami perubahan signifikan menuju ke arah liberalisasi media. Dari hasil monitoring terhadap regulator media dan komunikasi tersebut ditemukan hal-hal berikut:

- 1) Hasrat negara masuk dalam struktur lembaga regulator media masih sangat tinggi.
- 2) Lembaga regulator media kurang memiliki otonomi relatif terhadap negara karena faktor ekonomi dan informasi sebagai diterminisme kekuasaan. Termasuk Dewan Pers yang merupakan *self-regulatory body*.
- 3) Lembaga regulator media cenderung melakukan pembiaran terhadap masalah *diversity of ownership* industri media, *diversity of contents*.

- 4) Terjadi "kooptasi" birokrasi dalam lembaga regulator. Dalam kaitan ini, ada sebuah kecenderungan kuat dimana lembaga regulasi masuk ke dalam *bureaucratic trap* (jebakan birokrasi) terutama lembaga regulator yang dipreskripsikan sebagai lembaga penopang demokrasi.
- 5) Ada kecenderungan komisioner yang "menikmati" keterjebakan itu sehingga mereka tidak mampu membuat terobosan-terobosan besar guna membongkar struktur yang menghambat proses demokrasi.
- 6) Kerja lembaga regulator mengikuti ritme birokrasi karena diterminisme sistem anggaran pemerintah menentukan aktivitas lembaga regulator (rezim kesekretariatan).
- 7) Secara kultural anggota komisioner tidak mampu menjadi agen perubahan terhadap ritme dan perilaku birokrasi.

Dari hasil temuan-temuan tersebut PR2media merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Unsur pemerintah perlu dikurangi (atau dikeluarkan) dari lembaga regulator media dan informasi, khususnya KPI dan KI.
2. Dewan Pers perlu fokus pada upaya menanggalkan pasal-pasal defamasi, menjaga independensi, dan menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan.
3. KPI perlu tampil berani dalam revisi undang-undang penyiaran untuk mengembalikan KPI sebagai regulator tunggal bidang penyiaran.
4. LSF perlu dibubarkan dan kemudian diganti dengan lembaga klasifikasi, karena itu Undang-undang perfilman dicabut.
5. BRTI di masa depan perlu didorong menjadi lembaga yang independen, dan mekanisme perekrutan anggota komitenya harus melibatkan wakil rakyat sesuai dengan mekanisme demokrasi.

III. CATATAN KOMISI I DPR RI

1. Komisi I DPR memberikan apresiasi kepada Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media) atas kepeduliannya terhadap dinamika perkembangan demokratisasi media di Indonesia berikut hasil kerjanya berupa hasil penelitian terhadap eksistensi lembaga regulator.
2. Komisi I DPR RI akan menjadikan hasil penelitian dan rekomendasi dari PR2Media sebagai masukan penting sehubungan dengan proses revisi UU No 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sehingga melalui regulasi penyiaran yang baru, dapat mendukung terciptanya demokratisasi di bidang media demi melindungi kepentingan publik.
3. Sehubungan dengan salah satu hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Selasa, 18 Januari 2011, bahwa : "Komisi I DPR RI minta agar KPI melakukan evaluasi berbasis riset dengan bekerjasama dengan pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga riset dalam rangka peningkatan kualitas isi siaran dan penguatan kelembagaan KPI," dalam kaitan ini, komisi I DPR RI menyarankan agar PR2Media dapat bekerjasama dengan KPI, baik dalam bentuk kerjasama di bidang penelitian maupun memberikan masukan dan saran agar kinerja KPI dapat terus meningkat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.

Jakarta, 19 Januari 2011

**KETUA RAPAT,
TTD
H. HAYONO ISMAN, S.IP.
A-450**